



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN KESAMBEN
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridho- Nya telah tersusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2021-2026. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Rancangan Perubahan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Rancangan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Kesamben sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2021-2026 ini semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Kesamben, 29 November 2022

CAMAT KESAMBEN

R. SETIYANA, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680810 199703 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-9
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-17
Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
Bab VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Bab VIII. PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi SDM berdasarkan status kepegawaian	II-11
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN.....	II-11
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	II-11
Tabel 2.4	Kondisi Berdasarkan Umur PNS	II-12
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-12
Tabel 2.6	Daftar Asset Kecamatan Kesamben	II-12
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	II-14
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	II-18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Kesamben	III-
Tabel 3.2	2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kec. Kesamben terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati.....	III-7
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Kesamben	IV-
Tabel 5.1	4 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1	
Tabel 5.2	V-4 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3.....	
Tabel 5.3	V-5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	
Tabel 6.1	V-8 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan tahun perencanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Penyusunan Jadwal Penyusunan Renstra PD
3. Pengumpulan Data dan Informasi
4. Orientasi Penyusunan Renstra PD

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

C. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD
2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD
3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD

D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1. Persiapan Forum
2. Pelaksanaan Forum

E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi

F. Penetapan Renstra PD

Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati

Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Kesamben berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1
INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan

Kesamben sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Kesamben.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kesamben Tahun 2021 – 2026 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan **fungsi** kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdiri dari :

Camat; bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan :dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.

Fungsi : Menyusun kebijakan teknis operasional pemerintahan

- Menyenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Menyenggarakan pembinaan Wilayah;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan publik;
- Menyusun laporan Kinerja secara periodik kepada Bupati;dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada Camat.

Tugas : Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta arsip

Fungsi : - Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja;

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dolumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- Mempimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- Mengkoordinasian urusan kehumasan,keprotokolan dan kepustakaan;

- Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh desa;
- Mengkoordinasikan asset/kekayaan daerah yang ada di kantor kecamatan;
- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan redistribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
- Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Publik;
- Memfasilitasi pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Mengkordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : Penyusunan program,Evaluasi,pelaporan dan Keuangan.

Fungsi : - Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
- Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Menyusun pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun penatausahaan keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran’
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Menyusun Administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran restribusidan/atau lain- lain pendapatan yang sah;
- Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Fungsi : - Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh beberapa Seksi yaitu :

a. Seksi Pemerintahan

Tugas : - Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

- Fungsi :
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - Mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
 - Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau Desa;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
 - Mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Melaksananakan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pemerintahan;
 - Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 - Memfasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa;
 - Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - Mefasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan/atau desa;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

b. Seksi Pelayanan publik

Tugas : - Penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik;

Fungsi : - Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan;

- Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat masyarakat yang menjadi ruang lingkup di kecamatan;
- Menyusun pelayanan standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- Mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;

- Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang di butuhkan masyarakat;
- Melaksanakan stradar pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayan publik;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : - Penyelenggara sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat

- Fungi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam furom musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan kecamatan;
 - Memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempuyai program kerja dan kegiatan pemebrdayaaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahandan/atau desa;
 - Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian ,perdagangann, pertanian kepariwisataaan, perkoperasian, dan usaha kecil Menengah (UKM);

- Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

d. Seksi Ketentraman dan ketertiban

- Tugas:
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - Memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara republic Indonesiadan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan umum di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;

- Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan/desa;
- Menjaga pembinaan perlindungan Masyarakat;
- Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Camat.

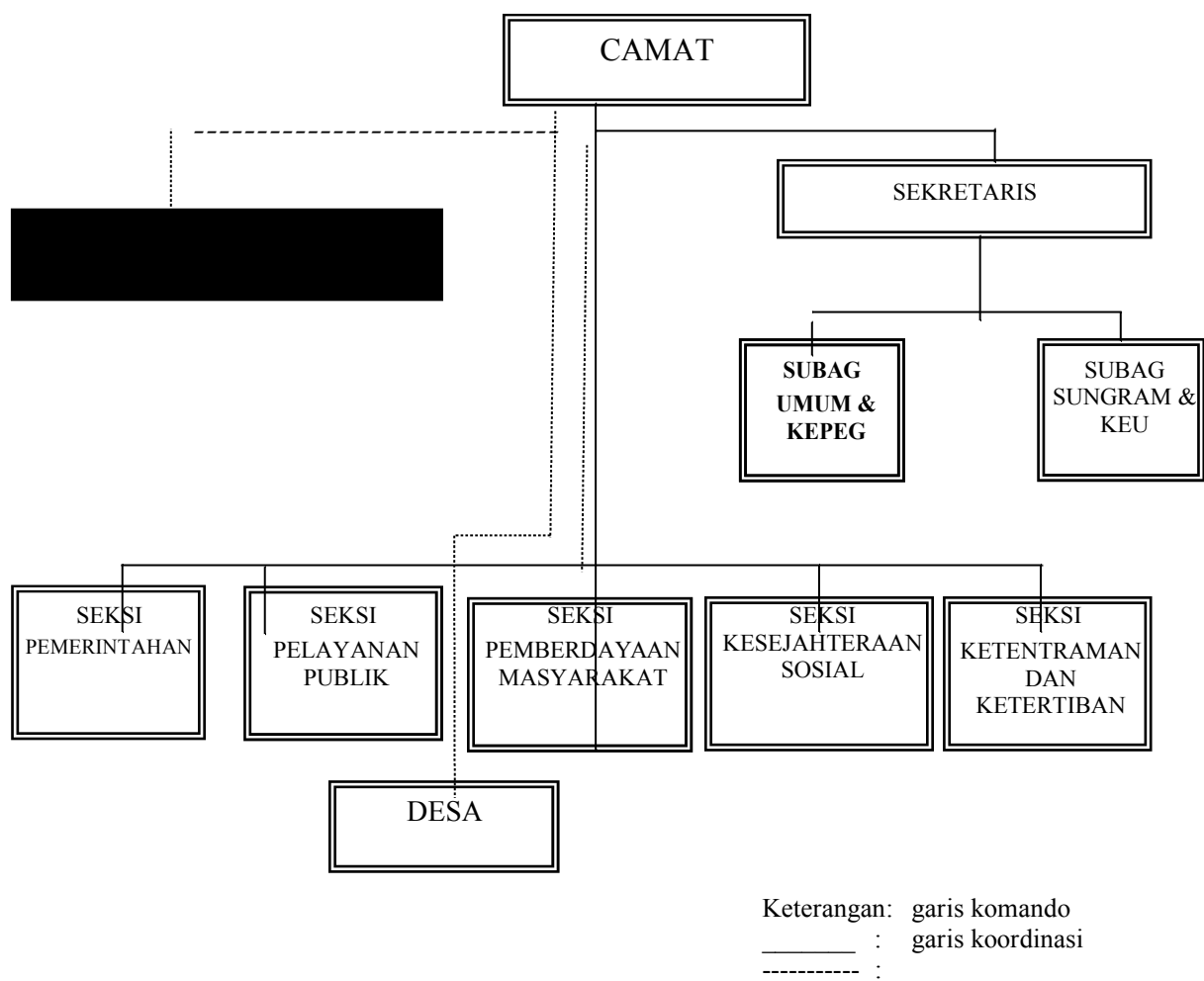
e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Tugas:
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang bertugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
 - Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
 - Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
 - Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - Melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;

- Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan Masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Di dalam tata kerja Kecamatan Kesamben disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Kesamben bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben dibawah ini :

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KESAMBEN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben didukung sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Kesamben sebanyak 7 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 3 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah ASN non eselon sebanyak 3 orang, tenaga harian lepas 3 orang.

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1

Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	10 orang	77%
2	Tenaga Harian Lepas	3 orang	23%
Jumlah		13 orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben

b. Komposisi Eselon ASN

Tabel 2.2

Komposisi Esselon ASN

No.	Eselon Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Eselon III-A	1 orang	10 %
2	Eselon III-B	1 orang	10 %
3	Eselon IV-A	3 orang	30 %
4	Eselon IV-B	2 orang	20 %
5	Non Eselon	3 orang	30 %
Jumlah		10 orang	100%

Sumber Data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben

c. Komposisi Pendidikan

Tabel 2.3

Komposisi Pendidikan

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Persentase
1	SMA	2 orang	20 %
2	S1	5 orang	50 %
3	S2	3 orang	30 %
Jumlah		10 orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben

d. Komposisi Umur PNS

Tabel 2.4
Komposisi Umur PNS

No.	Umur Pegawai	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	0 orang	0 %
2	36 – 40 tahun	1 orang	10 %
3	41 – 45 tahun	4 orang	40 %
4	46 – 50 tahun	1 Orang	10 %
5	> 51 tahun	4 orang	40 %
Jumlah		10 orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben

e. Komposisi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5
Komposisi Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4 orang	40 %
2	Perempuan	6 orang	60 %
Jumlah		10 orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesammben didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai yang bisa menunjang kegiatan operasional kantor.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	145 unit	Kondisi Baik
Jumlah		145 Unit	

Sumber data : Diolah

2.3 **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Kesamben sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 mempunyai sasaran utama meningkatnya pelayanan kecamatan dan meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama periode Renstra tersebut pencapaian kinerja dan anggaran Perangkat daerah Kecamatan Kesamben dapat dilihat pada tabel di bawah :

a. Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Sasaran, Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	NA	Puas	Puas	Puas	Puas		Puas	Puas	Puas	Puas					
	Persentase Kepuasan Aparatur	Persen	80%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Jenis	6	6	6	6	6		6	6	6	6		100	100	100	100
	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	70%	74%	78%	82%	87%		74%	77%	85%	87%		100	98,72	103,66	100
	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	Unit	15	87	90	113	118		86	126	140	185		98,85	140	123,89	156,78
	Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Persen	NA	100%	100%	100%	100%		115%	133%	56%	100%		115,	133	56	100
	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	12	12	13	13	13		15	21	6	13		125	161,54	46,15	100
	Skore SAKIP SKPD	Predikat	CC	CC	B	BB	BB		B	B	B	BB					
	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	Persen	75%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	97%	100%		100	100	97	100
	Jumlah dokumen	Dokumen	NA	5	14	14	14		14	11	13	14		280	78,57	92,86	100

	Jumlah dokumen	Dokumen	NA	11	21	21	21		21	21	21	21		190,91	100	100	100
	Jumlah profil kecamatan	Dokumen	NA	1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
	Jumlah desa yang menyusun profil	Desa	NA	10	10	10	10		10	10	10	10		100	100	100	100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perdikat	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	NA	Baik	Baik	Baik	Baik					
	Persentase kepuasan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%		80	100	100	100
	Jumlah Obyek Monev	Desa	NA	10	10	10	10		10	10	10	10		100	100	100	100
	Jumlah ijin yang diterbitkan	Ijin	NA	48	24	24	24		42	21	0	24		87,50	87,50	0,00	100,00
2	Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	65%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	93%	95%		100	100	103,33	100
	Persentase peningkatan desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	60%	80%	80%	80%	80%	70%	75%	90%	100%	80%		93,75	112,5	125	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	NA	80%	85%	90%	95%		80%	85%	93%	95%		100	100	103,33	100

	Persentase desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	NA	80%	80%	80%	80%		75%	90%	100%	80%		93,75	112,5	125	100
	Jumlah desa /kel yang dibina	Desa	NA	10	10	10	10		10	10	10	10		100	100	100	100
	Jumlah Perdes yang dievaluasi	Perdes	NA	10	40	40	40		20	30	40	40		200	75	100	100
	Jumlah Pilkades yang dilaksanakan	Desa								6							
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kali	NA	12	12	12	12		12	12	18	12		100	100	150	100
	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	NA	40	40	40	40		43	29	20	40		107,5	72,50	50	100
	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan	Kali	NA	30	30	30	30		31	29	21	30		103,3 3	96,67	70	100

Sumber data : Data Kec. Kesamben diolah

Faktor Pendorong :

1. Ketersediaan SDM
2. Cepat menerima Informasi
3. Media Informasi
4. Sarana Informasi Online

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Dana
2. Kurangnya SDM
3. SDM perlu peningkatan Kapasitas

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Kesamben untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Instansi Kecamatan Kesamben. Adanya pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan yang luar biasa terkait penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, rasionalisasi anggaran telah memaksa aparatur pemerintah untuk bekerja dengan sumberdana yang terbatas, namun dibalik itu tetap ada semangat dalam melayani masyarakat.

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Kesamben dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.8

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

URAIAN SUMBER KEUANGAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
2017-2020																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Langsung																	
Belanja Modal																	
Belanja Barjas																	
Belanja Pegawai																	
2021																	
Belanja Operasi																	
Belanja Modal																	
Bantuan Tidak Terduga																	
Belanja Transfer																	

Sumber data : Simda Keuangan

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang baik

Faktor Penghambat :

1. Ketersediaan Dana yang kurang
2. Situasi Pandemi atau Bencana Non Alam

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 2) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
- 3) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat karena dampak pandemi covid-19, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam

penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- 4) Adanya potensi pariwisata, perdagangan, dan pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kesamben

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya pelayanan PATEN	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
			Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan
			Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dalam melaksanakan / memfasilitasi peningkatan kesejahteraan social
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya koordinasi Linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah Desa dalam satu kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,	Belum optimalnya sarana dan prasarana social, umum yang menjangkau seluruh wilayah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pemuda dan olah raga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

Sumber data : Diolah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan. Visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)”.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar

dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun warobbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun warobbun ghafuur berarti: "Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa
- Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal
- Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan
- Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan

Pembangunan dengan :

- Memastikan pembangunan yang adil dan merata
- Membentuk birokrasi pemerintah professional, lincah dan berintegritas.
- Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai

problem solving permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi social diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas SumberDaya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk

unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Kesamben sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Tabel . 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan (Perangkat Daerah) terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Toyjibatun,			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas masih kurang	Adanya sinergitas antara pemerintah kecamatan dengan Kepolisian dan TNI di wilayah dalam rangka menjaga stabilitas wilayah
		Sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan ke seluruh kecamatan masih minim	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sarana dan prasarana sosial di wilayah masih belum optimal	Pemanfaatan dana desa secara maksimal untuk pemenuhan sarana dan prasarana wilayah
		Dukungan data dan informasi dari desa belum optimal	
2. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan Paten masih kurang	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan di kecamatan
		Kemampuan	

el, inovatif dan berintegritas		n SDM dalam memberikan pelayanan Paten Masih Kurang	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang masih belum maksimal	Kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat
		Kualitas SDM aparatur desa dalam melaksanakan/ memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial masih belum optimal	
		Pembinaan administrasi desa belum optimal	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan belum optimal	Kegiatan fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan sebagai evaluasi pemanfaatan dana desa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengingat tugas dan fungsi kecamatan yang dalam menjalankan pelayanan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L tertentu dan Renstra perangkat daerah tertentu di propinsi, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kecamatan Kesamben merupakan Wilayah Kecamatan yang merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang ada di wilayah

Kabupaten Blitar yang cenderung mempunyai struktur tanah yang sebagian besar untuk pertanian.

Kecamatan Kesamben terletak di Wilayah Kabupaten Blitar yang tepatnya berada di sebelah barat ibu kota Kabupaten Blitar , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Doko
- Sebelah selatan : Kecamatan Binangun
- Sebelah timur : Kecamatan Selorejo
- Sebelah barat : Kecamatan Selopuro

Berdasarkan pemutakhiran Master File Desa BPS Kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben dengan luas wilayah 59,66 Km² terbagi menjadi 10 desa. Desa Jugo merupakan desa terluas diantara 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kesamben dengan luas 8,79 Km². Sedang Desa Kesamben merupakan desa dengan wilayah terkecil dengan luas 3,24 Km². (*Sumber : Kecamatan Kesamben Dalam Angka 2022*). Kecamatan Kesamben terdiri dari 10 Desa meliputi :

- Desa Siraman
- Desa Kesamben
- Desa Jugo
- Desa Pagergunung
- Desa Sukoanyar
- Desa Pagerwojo
- Desa Tepas
- Desa Kemirigede
- Desa Bumirejo
- Desa Tapakrejo

Kecamatan Kesamben merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada hasil pertanian.

Kecamatan Kesamben selain mempunyai sawah dengan irigasi, di Kecamatan Kesamben juga merupakan daerah pengembangan tebu,

kelapa, dan pisang. Untuk peternakan, Kecamatan Kesamben merupakan area pengembangan ayam ras, ayam buras, itik, entok dan ikan hias/Ikan Koi. Dalam rencana tata ruang kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben juga merupakan kawasan peruntukan industri besar, sentra industri kecil aneka kripik, sambel pecel , batu bata, industri Jamu, dan industri makanan.

Dalam mewujudkan amanat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, terdapat beberapa factor lingkungan baik internal maupun eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, masalah yang timbul adalah berubahnya alih fungsi lahan yang dulu lahan pertanian untuk tanaman pangan begitu luas, sekarang menjadi sempit dengan penggunaan lahan pertanian untuk bangunan rumah atau pergudangan. Dengan bertambahnya jumlah manusia dan adanya kebijakan yang mengatur tentang tata ruang yang tidak efektif dan efisien akhirnya lahan pertanian menjadi tidak produktif lagi.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Di Indonesia banyak sekali tersedia sumber daya manusia yang secara langsung bisa dimanfaatkan. Pada tingkat sekolah lanjutan atas banyak anak yang lulus SPMA atau SMK jurusan pertanian yang sudah diluluskan. Di tingkat perguruan tinggi ada ratusan sarjana yang sudah diluluskan. Selain dari pendidikan formal juga ada generasi muda yang mendalami bidang pertanian, baik dari hasil pelatihan dan dari hasil belajar secara otodidak dari orang

tua yang pekerjaan mereka sebagai petani dan ikut kerja di perkebunan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang merupakan Negara agraris mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan pertanian.

b. Sarana/prasarana

Dengan semakin banyaknya lulusan dan sarjana pertanian merupakan modal tersedianya tenaga kerja yang handal dan bisa diberdayakan secara optimal. Dan dengan berkembangnya daya kreatifitas dari sarjana ini dapat memunculkan berbagai inovasi teknologi yang berdaya saing tinggi. hal tersebut membuat pembangunan bidang pertanian bisa berjalan dengan baik.

c. Keuangan

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, yang apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam pembangunan bidang pertanian. Dengan memanfaatkan hasil dari bercocok tanam, berkebun, berternak hewan dan ikan, bisa diputar kembali sebagai modal dan mencukupi kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Selain itu juga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan maka investasi tidak berhenti di kota saja, sehingga desa akan mendapat investasi dari perkembangan ekonomi yang baik, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Dengan tersedianya Sumber daya manusia yang mumpuni dan didukung sarana/prasarana serta keuangan yang baik, maka akan memunculkan teknologi yang baru yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Kemunculan teknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat, bisa menghasilkan produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat dan bahkan bisa dinikmati

sebagai produk ekspor unggulan bangsa Indonesia. Sehingga *in come* masyarakat dan devisa Negara meningkat.

2. Faktor Penghambat

Pada faktor penghambat ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Dengan perubahan pola pikir dan persepsi yang berbeda dan bermacam-macam, maka banyak sarjana dan lulusan yang berpandangan bahwa pertanian merupakan sektor pekerjaan kuno yang pantas untuk ditekuni oleh orang tua dan orang desa saja. Juga kurangnya jiwa kewirausahaan sehingga lebih memilih menjadi karyawan ketimbang menciptakan peluang usaha. Selain itu banyak lulusan dan sarjana yang pergi ke kota atau luar negeri menjadi TKI dengan tujuan mencari uang banyak . Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan ketahanan pangan.

b. Sarana/prasarana

Kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk sarana yang menunjang pembangunan ketahanan pangan menjadi sebab kelemahan juga. Selain itu adanya alih fungsi lahan sebagai penyebab kurangnya sarana/prasarana pertanian untuk pengembangan tanaman pangan.

c. Keuangan

Kurangnya permodalan yang digunakan untuk pertanian dan pengembangan tanaman pangan juga berpengaruh kepada semangat petani untuk mengembangkan lahan disekitar mereka. Selain itu, adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang tidak disertai dengan teknologi yang mendukung untuk mengatasi perubahan iklim ini karena dana yang terbatas, maka banyak petani yang menyerah pada keadaan.

d. Teknologi

Keterbatasan teknologi tepat guna dan masih banyaknya petani yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga penerapan sistem pertanian yang cepat, modern dan pengolahan hasil pertanian yang higienis tidak terwujud. Penerapan sistem pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang ada sekarang masih apa adanya dan tergantung pada kondisi alam sehingga produk yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dan disahkan telah berpengaruh besar pada pembangunan dan pengembangan sektor ketahanan pangan. Hal ini tampak dari kebijakan – kebijakan yang ada baik di tingkat pusat kurang didukung dengan kebijakan yang ada di daerah karena situasi dan kondisi yang berpengaruh besar di daerah tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor peluang ini ada 4 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu :

a. Politik

Di negara demokrasi seperti Indonesia, bidang politik sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun bila kebijakan politik yang dikeluarkan itu dibuat berdasarkan pada situasi dan kondisi wilayah negara kesatuan republik indonesia serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat indonesia, maka pembangunan pertanian dapat berjalan dengan lancar., sehingga diharapkan pembangunan pertanian merupakan prioritas pembangunan yang utama. Hasil pembangunan pertanian tidak dapat dilihat secara langsung untuk waktu sekarang, namun dapat dirasakan untuk waktu yang panjang dan berguna untuk kelangsungan hidup umat

manusia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu,
diharapkan para elit

politik mempunyai gagasan atau program yang bisa mendukung dan mengarah untuk pembangunan pertanian..

b. Ekonomi

Bidang pertanian merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan mendatangkan devisa bagi negara. Bila peningkatan pembangunan ekonomi tidak dititik beratkan pada salah satu bidang, namun juga meningkatkan pembangunan pada semua bidang.

c. Persaingan

Dalam usaha pasti ada persaingan, apalagi produk yang diproduksi sama. Namun jika kita bisa mengelola dengan baik, maka kita dapat mengatasi dengan inisiatif dan kreatifitas kita sendiri. Begitu juga dengan pembangunan bidang pertanian . Bila semua masyarakat indonesia mempunyai daya kreatifitas yang tinggi, maka penganekaragaman bahan pangan akan bervariasi sesuai daya kreatifitas masyarakat dengan berbasis bahan baku lokal. Sehingga ketergantungan bahan pangan tidak terpancang pada beras saja. Hal ini dapat mengurangi pemerintah untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Karena ketersediaan dan keanekaragaman bahan pangan bangsa Indonesia yang cukup besar. Dengan ketercukupinya stok bahan pangan di indonesia maka kita bisa mengeksport bahan pangan non beras sehingga membuat daya saing yang luas.

d. Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sangat terbuka luas memberi kesempatan pada petani dan penyedia bahan pangan untuk menyerap teknologi baru dengan mengembangkan produksinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan kemajuan teknologi ini petani Indonesia mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang cara berbudidaya yang baik dan dapat

mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal untuk dikembangkan dan diolah menjadi produk yang di gemari oleh masyarakat Indonesia serta dapat dinikmati oleh masyarakat luar negeri.

2. Faktor Penghambat

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi antara lain :

a. Politik

Kebijakan politik dari elit politik sangat berperan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Hal ini dapat memengaruhi hasil yang telah dicapai, apabila kebijakan politik itu baik dan mengarah untuk kesejahteraan masyarakat luas, maka kemakmuran masyarakat akan terlihat baik. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka kesengsaraan masyarakat akan tampak, bahkan masalah baru bisa muncul dari kebijakan tersebut. Dengan adanya pengaruh dari segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka kita harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

b. Ekonomi

Krisis ekonomi yang telah melanda dunia pada tahun 1997 lalu telah mengoyak perekonomian Indonesia yang mana keadaan politik juga sempat goyah dengan munculnya gerakan reformasi. Dimana pembangunan bidang pertanian juga ikut goyah dengan perubahan iklim yang sangat drastis, dimana dengan perubahan iklim tersebut terjadi kegagalan panen yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor bahan pangan, bukan hanya beras saja namun juga ubi-ubian harus diimpor dari luar negeri.

c. Persaingan

Dengan berlakunya pasar bebas Asia yang dimulai pada tahun 2010 tersebut, dapat kita rasakan pengaruhnya pada tahun sekarang ini. Dimana produk-produk dari luar negeri terutama cina membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi program yang telah disepakati oleh anggota APEC. Produk dari cina yang harganya masih diatas harga local dan jumlah yang besar telah menyisihkan produk lokal tersebut. Bangsa Indonesia malah terlena dengan perkembangan politik dalam negeri pasca reformasi ketimbang mempersiapkan kemajuan ekonomi untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga disinilah ancaman yang menerpa bangsa Indonesia sehingga kita kalah bersaing.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi kadang ditanggapi latah oleh penduduk Indonesia, dimana mereka kadang tidak mau menyaring perkembangan teknologi yang ada dengan benar, yang seharusnya dijadikan sebagai sumber informasi atau inovasi malah tidak ditanggapi dengan serius, malah perkembangan teknologi yang tidak dapat dijadikan tuntunan malah didahulukan. Sehingga pemerintah sebagai regulator harus bisa mengatur dengan benar.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak

mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan di Kantor Kecamatan Kesamben, sangat erat sekali. Pembangunan sangat didukung oleh rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis. Karena pembangunan di Kecamatan Kesamben pelaksanaannya didukung dan dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder*, maka pembangunan yang terpadu harus benar-benar didukung dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kecamatan Kesamben, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS “

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yaitu :

- 1) Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal.
- 2) Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
- 3) Pentingnya percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
- 4) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD.
- 5) Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- 6) Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana.
- 8) Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.
- 9) Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
- 10) Keberpihakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difabel dan penyandang kesejahteraan sosial.
- 11) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- 12) Tantangan penyediaan layanan public yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari

tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Kesamben meliputi :

- 1) Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga;
- 2) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD;
- 3) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dan Ketersediaan Sarana-Prasarana;
- 4) Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 5) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- 6) Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- 2) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

- 3) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Kesamben harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Kesamben melaksanakan 2 misi dari 4 misi RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yaitu misi ke 1 dan 3. Pada Misi ke 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan untuk mewujudkan misi ke-3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Kesamben dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
2. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang

ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Kantor Kecamatan Kesamben maka ditetapkan indikator tujuan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Kesalehan Sosial
3. Predikat Sakip Perangkat Daerah
4. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Kesamben yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan

yang dapat diselesaikan;

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada ;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;
- f. Meningkatkan system pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel.4.1

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,94	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5
		1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	90%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
2.	Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan		Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	n/a	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	gotong royong dalam kehidupan masyarakat	2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Persen	n/a	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
			Persentase desa mandiri di kecamatan	Persen	n/a	7%	14%	21%	28%	35%	43%	43%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	67,85	66,75	69	69,50	70	71	72	72
		4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	Persen	n/a	50%	50%	56%	64%	71%	78%	78%
			Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	Jumlah	n/a	3	4	5	6	7	8	8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi “***Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun ,thoyibbatun, warofun ghofur***”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Kesamben sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Kesamben adalah menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Kesamben.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah tujuan kesatu yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa dengan sasaran yang sama yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa, tujuan kedua yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan tujuan ketiga adalah meningkatnya kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Kesamben.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2022 sampai dengan 2026.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan

program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Selanjutnya, berkenaan dengan strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT sasaran renstra Kecamatan Kesamben setidaknya perlu lebih dalam dipahami terlebih dahulu. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat Rentrsa Kantor Kecamatan Kesamben 2021-2026 terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threat). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat dformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adala strategi S-O, stategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang.

Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divesment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Tabel 5.1
Analisis SWOT dan Perumusan Strategi 1

MISI 1 : Meninrkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya			
Analisis SWOT SASARAN : terwujudnya Penghayatan dan penrapan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social dan Gotong-royong dalam kehidupan Masyarakat			
Kekuatan	• Latar belakang legislative dan eksekutif yang beragam baik kelpmpok.golongan, agama maupun suku mampu menjamin keadilan kebijakan untuk semua golongan di Kabupaten Blitar	Pemanfaatan Kekuatan	• Mamanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil
Kelemahan	• Kelembagaan FKUB perlu ditingkatkan	Mengatasi kelemahan	• Penguatan instutusionalisasi FKUB Kecamatan Kesamben
Peluang	• Toleransi, solidaritas dan rasa sling menghargai yang membudaya	Mengeksploitasi Peluang	• Melesatarikan Modal social positif di Kecamatan Kesamben
Tantangan	• Ancaman Radikalisme dan Paham Terorisme	Menghadapi Tantangan	• Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
Masalah	• Institusionalisasi (Perlembagaan) FKUP belum optimal • Ancaman Rakilaisme dan Paham Terorisme	Strategi	• Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme

Sumber data : Diolah

Tabel 5.1
Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3

Misi 3 : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel , Inovatif dan Berintegritas			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa			
Kekuatan	• Telah ada sistem informasi pemeritahan terintegrasi	Pemanfaatan Kekuatan	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi terintegrasi
Kelemahan	• Keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa • Keterbatasan SDM pelayanan langsung	Mengatasi kelemahan	• Penguatan efektivitas daerah dan pemerintah Desa • Peningkatan Keselarasan pembangunan daerah dan desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa
Peluang	• Dana yang dikelola Desa relatif stabil sehingga meringankan beban APBD dalam pembangunan di Kabupaten Blitar	Mengeksploitasi Peluang	• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal
Tantangan	• Keterbatasan kapasitas penganggaran dan pengelolaan keuangan perangkat desa • Topografi wilayah luas, sehingga menjadikan akses masyarakat terhadap layanan tidak dapat merata dan adil	Menghadapi Tantangan	• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kecamatan Kesamben

Masalah	• Belum optimalnya pengoperasian teknologi informasi dan keterbatasan SDM mereduksi kualitas dan jangkauan layanan	Strategi	• Optimasilasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi birokrasi yang dinamis dan responsif
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			
Kekuatan	• Telah ada system informasi pemerintahan terintegrasi • Opini BPK WTP 4 Tahun berturut-turut	Pemanfaatan Kekuatan	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan
Kelemahan	• Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan public perlu ditingkatkan • Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM • Belum optimalnya inplementasi System Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik yang terintegrasi • Ketersediaan dan simplifikasi regulasi belum optimal • Pemenuhan dokumen adminduk kepada seluruh masyarakat belum optimal • Ketersediaan data valid masih kurang mendapat perhatian dari produsen data • Keterbukaan informasi belum optimal	Mengatasi kelemahan	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimasilasi transparansi pemrintahan • Meningkatkan implementasi , evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah

	• Pengelolaan asset belum optimal		• Optimalisasi pengelolaan asset daerah
Peluang	• Akses informasi dan fleksibilitas koordinasi meningkat • Cakupan akses jaringan internet meluas (mobile data)	Mengeksploitasi Peluang	• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi
Tantangan	• Prosedur pelayanan dituntut cepat dan jelas • Tuntutan transformasi birokrasi yang agile/tangkas dan dinamis berbasis digital oleh pemerintah pusat	Menghadapi Tantangan	• Optimalisasi transformasi birokrasi
Masalah	• Kepuasan msyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil sempurna	Strategi	• Layanan publik lebih cepat , baik, dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sumber data : Diolah

Berdasarkan hasil analisa skoring SWOT sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.1 dan Tabel 5.2** didapatkan strategi dimana untuk lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar mendapatkan strategi yang sesuai kemudian diidentifikasi arah kebijakan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar disajikan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5. 3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)		:	Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)		
MISI 1 (RPJMD)		:	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya		
MISI 3(RPJMD)		:	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Daerah Yang akuntabel, inovatif dan berintegritas		
NO	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayan public di Kecamatan	1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan public sampai ke desa	Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi • Memperkuat efektifitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa • Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal • Meningkatkan kapasitas

					pengelolaan keuangan perangkat desa di kecamatan
		2	Meningatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme	• Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil • Memperkuat institusionalisasi FKUB Kecamatan Kesamben • Melestarikan modal social positif Kecamatan Kesamben • Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
		3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan aparatur desa	• Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa • Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pebinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil/dampak	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digitas • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan daerah • Peningkatan sarana dan prasarana

					pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM Aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandardisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimalisasi transparansi pemerintahan • Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan asset daerah • Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi • Optimalisasi transformasi
--	--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini merupakan uraian tentang Rencana Kinerja Kecamatan Kesamben selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai, Indikator Sasaran (Impact), Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD, Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan
adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus equvalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar
2. Sasaran
merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan, di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran.
3. Indikator Sasaran (Impact)
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian outcome dengan kata kunci *“Apa yang ingin diubah”*
4. Program
Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik.Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Kesamben sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

6. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output dengan kata kunci ***“Apa yang ingin dicapai”***

7. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci ***“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”***

8. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)

Berisikan tentang anggaran awal tahun 2016 beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembandingan 5 tahun kedepan

9. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Kesamben dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut

10. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2021) Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD

11. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab

12. Lokasi

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 8 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

C. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Reastra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X XX 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat pencapaian Kinerja Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100%	1,344,262,405	100%	1,973,426,300	100%	2,003,073,100	100%	2,033,073,100	100%	2,063,563,200	100%	10,017,404,105	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%		100%	15,039,500	100%	10,039,500	100%	10,335,887	100%	10,534,284	100%	10,853,141	100%	56,868,312	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%		%	1,623,591,537	%	1,664,181,325	%	1,703,066,246	%	1,740,501,302	%	1,784,014,450	%	8,515,355,460	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	%		100%	5,000,000	100%	4,000,000	100%	4,100,000	100%	4,202,500	100%	4,307,563	100%	21,610,063	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100%	15,000,000	100%	15,375,000	100%	15,759,375	100%	25,300,744	100%	20,000,000	100%	31,435,113	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%		100%	56,381,721	100%	46,714,731	100%	46,350,262	100%	44,434,516	100%	33,858,648	100%	234,339,878	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%		100%	65,000,000	100%	66,625,000	100%	52,208,318	100%	45,625,000	100%	40,500,000	100%	263,358,318	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
		X XX 01.1.08	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%		100%	88,235,847	100%	30,441,743	100%	32,702,787	100%	85,600,000	100%	87,740,000	100%	444,720,377	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar

		X	XX	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai	%		100%	76,013,800	100%	76,043,000	100%	77,350,225	100%	76,754,154	100%	76,283,339	100%	383,056,578	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa		X	XX	02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentae desa dengan predikat IKM Baik	%		30%	57,358,407	30%	65,812,000	30%	70,375,600	30%	71,158,300	100%	71,583,500	100%	336,888,407	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kali		2	27,863,407	2	34,842,250	2	35,713,306	2	36,606,139	2	36,166,920	10	171,192,022	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Layanan		1	17,425,000	1	18,296,250	1	22,271,956	1	21,237,665	1	21,768,607	5	100,399,478	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kali		1	12,070,000	1	12,673,500	1	12,930,338	1	13,315,036	1	13,647,973	5	64,636,907	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
Persentase desa Mandiri di kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa	X	XX	22	00	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat Desa.	Pemberdayaan		1	50,428,870	1	191,383,400	1	210,087,800	1	210,630,400	1	211,887,100	5	875,023,570	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali		2	50,428,870	2	191,383,400	2	210,087,800	2	210,630,400	2	211,887,100	10	875,023,570	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar	
		7	1	3	2:06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kewarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan		1	-													
		X	XX	22	00	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa Yang dibuat	Peraturan perundang-undangan desa		20	373,818,551	20	103,778,000	20	113,560,300	20	113,854,200	20	116,700,555	100	827,712,206	Kecamatan Kesamben	Kab. Blitar

Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan		X	XX	22	00	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	Kali		2	46,207,613	2	168,633,300	2	184,536,500	2	185,013,100	2	186,117,100	10	770,513,613	Kecamatan Kesambi	Kab. Blitar
Menurunnya jumlah pelanggaran di Kecamatan							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali		#REF!	34,907,613	6	133,633,300	6	149,536,500	6	150,013,100	6	150,242,100	#REF!	618,338,613	Kecamatan Kesambi	Kab. Blitar
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	Kali		1	11,300,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,875,000	5	152,175,000	Kecamatan Kesambi	Kab. Blitar
		X	XX	22	00	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	kali		3	71,333,001	3	90,805,800	3	93,365,800	3	93,622,500	3	100,216,300	15	461,344,001	Kecamatan Kesambi	Kab. Blitar
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	Kali		3	71,333,001	3	90,805,800	3	93,365,800	3	93,622,500	3	100,216,300	15	461,344,001	Kecamatan Kesambi	Kab. Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada **Tabel 7.1**

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
II	Indikator Sasaran :							
	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	80%	100 %	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti	85%	85%	100 %	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase desa yang memiliki administrasi baik .	65%	65%	80%	85%	90%	95%	100%
	4 Persentase desa mandiri di kecamatan	13%	13%	50%	55%	60%	70%	75%
	5uJumlah Keeksian Bumdes	1	1	3	5	8	10	12
	6 Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	B	BB	A	A	A

Sumber : Data Kecamatan Kesamben yang diolah

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Kesamben tahun 2021-2026, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben ditetapkan antara lain :

- 1) Seluruh aparatur melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Program dan kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun renja perangkat daerah dan RKA SKPD.
- 3) Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat daerah secara periodik.

Rencana Strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai , sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana strategis ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Diharapkan sekali Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Kesamben tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan serta arah dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita dalam menuju perbaikan. Amiiin.

